

**PRAKTEK PELAPORAN DAN PENYIDIKAN PENCURIAN  
SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN**

**Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surabaya Selatan**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



**Oleh :**

**I PUTU SATRYA DHARMA**  
**NPM. 0671010030**

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
SURABAYA  
2010**

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Putu Satrya Dharma  
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 15 November 1988  
NPM : 0671010030  
Konsentrasi : Pidana  
Alamat : Aspol Kolombo 9a, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul : “PRAKTEK PELAPORAN DAN PENYIDIKAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN PEMBERATAN studi kasus di Kepolisian Resor Surabaya Selatan ” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya ciptaan saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka, saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui  
KAPROGDI

Subani SH, Msi  
NIP. 030 174 635

Surabaya, 10 Juni 2010  
Penulis

I Putu Satrya Dharma  
NPM. 0671010030

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengambil judul **“Praktek Pelaporan Dan Penyidikan Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Studi Kasus Di Kepolisian Resor Surabaya Selatan”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di fakultas hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan untuk menambah wawasan, serta menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di masyarakat.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan dan dorongan oleh beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Sudarto, MP., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Haryo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang selalu siap membantu penulis serta selalu memberikan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadep II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Prof.Dr. Indrati Rini, SH. MS selaku Dosen Penguji proposal skripsi dan Bapak Sutrisno, SH. M.Hum selaku Wadek II dan Dosen Penguji proposal skripsi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak. Prof. Dr. Wahyono. S.H. M.S dan Bapak. Drs. Warsito, S.H, M.Hum selaku Dosen penguji skripsi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Subani, S.H., M.Si selaku Ketua Program Studi dan Dosen Pembimbing Utama dan Ibu. Mas Anienda Tien F, S.H, MH selaku dan Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Bahagia Dachi, SH selaku Kepala Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
8. Bapak Leonard Sinambela selaku Kasat Reserse Kriminal Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
9. Bapak Shabda Purusha Putra selaku Kepala Unit I Pidana Umum Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
10. Bapak Kus Hartono dan Bapak Ali Imron selaku anggota Reserse Kriminal Unit I Pidana Umum Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
11. Bapak Pujiono selaku Kepala Unit II Pidana Ekonomi Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
12. Seluruh Anggota Polisi dan Pegawai Kepolisian Resor Surabaya Selatan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, atas kerjasamanya dalam penyusunan skripsi.

13. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
14. Bapak Sariyanto, S.Sos dan Bapak Tauhid Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
15. Kedua Kakek dan Nenekku I Nengah Tana dan Ni Ketut Seji yang selalu memberikan bantuan doa dan semangat.
16. Kedua Orang Tuaku I Wayan Oerip Soekarya dan Ni Made Puspawati yang selalu memberikan bantuan dana, semangat dan doa.
17. Kedua Saudaraku I Putu Bagus Jaya Suprana dan Desak Ayu Dewi Sartika yang telah memberikan semangat.
18. Teman-teman mahasiswa dan sahabat-sahabat khususnya Dony, Wahib, Fajar, Rudy, Reni, Lucia, Novi, Maya, Kiki, Manda dan Ruben yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan yang selanjutnya, sehingga dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 10 Juni 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kajian Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	11
<b>BAB II TINDAKAN OPERASIONAL PIHAK RESERSE KRIMINAL DALAM PELAPORAN DAN PENYIDIKAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN.....</b>	<b>16</b>
A. Skema Proses Pelaporan Dan Proses Penyidikan Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan.....	16
B. Proses Pelaporan Korban Pencurian Sepeda Motor	

Dengan Pemberatan .....	17
C. Proses Penyelidikan Pencurian Sepeda Motor	
Dengan Pemberatan .....	18
D. Proses Penyidikan Pencurian Sepeda Motor	
Dengan Pemberatan .....	20
E. Kasus Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan Di Wilayah	
Polres Surabaya Selatan .....	37
1. Fakta Hukum .....	37
2. Pertimbangan Hukum .....	38
3. Analisa Hukum .....	41
<b>BAB III HAMBATAN DAN SOLUSI ATAS PELAPORAN DAN</b>	
<b>PENYIDIKAN PENCURIAN SEPEDA MOTOR DENGAN</b>	
<b>PEMBERATAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jumlah Kasus Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan .....	44
B. Hambatan Atas Pelaporan Dan Penyidikan Pencurian Sepeda Motor	
Dengan Pemberatan .....	47
C. Solusi Atas Pelaporan Dan Penyidikan Pencurian Sepeda Motor	
Dengan Pemberatan .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>57</b>
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
 DAFTAR PUSTAKA	
 DAFTAR LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data-data Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Mulai Dari Bulan Januari 2009 Sampai Bulan Januari 2010 Di Wilayah Kepolisian Resor Surabaya Selatan .....	44



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Skema Proses Pelaporan Dan Penyidikan Pencurian Sepeda Motor Dengan Pemberatan .....	16

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Ijin Penelitian.
- Lampiran 2 : Surat Pelaporan.
- Lampiran 3 : Surat Perintah Penyelidikan.
- Lampiran 4 : Berita Acara Pemeriksaan Di Tempat Kejadian Perkara.
- Lampiran 5 : Surat Perintah Penyidikan.
- Lampiran 6 : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan.
- Lampiran 7 : Surat Perintah Penangkapan.
- Lampiran 8 : Berita Acara Penangkapan.
- Lampiran 9 : Surat Perintah Penahanan.
- Lampiran 10 : Surat Perintah Membawa Dan Menghadapkan Tersangka.
- Lampiran 11 : Berita Acara Penahanan.
- Lampiran 12 : Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan.
- Lampiran 13 : Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Badan.
- Lampiran 14 : Berita Acara Penggeledahan Rumah Tinggal/Tempat-tempat Tertutup Lainnya.
- Lampiran 15 : Berita Acara Penggeledahan Pakaian/Badan.
- Lampiran 16 : Surat Permintaan Izin Penggeledahan.
- Lampiran 17 : Surat Perintah Penyitaan.
- Lampiran 18 : Berita Acara Penyitaan.
- Lampiran 19 : Surat Permintaan Izin Penyitaan.
- Lampiran 20 : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pinyidikan (SP2HP).
- Lampiran 21 : Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Lampiran 22 : Daftar Pencarian Barang (DPB).

## **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pelaporan dan penyidikan sepeda motor dengan pemberatan oleh pihak Reserse Kriminal dan mengetahui hambatan dan solusi atas pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan oleh pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Surabaya Selatan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, sumber data diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah, perundang-undangan yang berlaku dan data-data pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan Unit I Pidum, analisa data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktek pelaporan dan penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Reserse Kriminal Kepolisian Resor Surabaya Selatan terhadap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan semua telah sesuai dengan standart oprasional Kepolisian berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan tugas dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu : pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

***Kata Kunci : Pelaporan dan Penyidikan, Korban, Pencurian Dengan Pemberatan.***

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

“Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. Maka, sifat-sifat yang ada di dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum”.<sup>1</sup>

Suatu tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat selalu mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun, dan itu tergantung pada warga masyarakatnya yang umumnya tingkat perekonomiannya kurang mampu, berpendidikan rendah dan pengangguran, dalam keadaan krisis dengan banyaknya pengangguran dan tingkat perekonomian di zaman yang modern seperti sekarang ini yang semakin hari semakin meningkat, dapat menimbulkan niat masyarakat untuk menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari salah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang dengan maksud mengambil dan memiliki barang milik orang lain dengan melawan hukum, tindak pidana ini tidak luput dari sasaran Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Surabaya Selatan untuk segera ditangani.

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2003, h. 1.

Salah satu jenis tindak pidana pencurian yang paling sering terjadi di dalam lingkungan warga masyarakat adalah pencurian sepeda motor dengan pemberatan atau biasa disebut dengan (curanmor atau curat), tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan merupakan jenis tindak pidana pencurian terhadap harta benda, sifat dari tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban dan barang yang diambil harus berharga.

Kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan yang dijadikan obyek penelitian, yaitu : pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka Antonius alexander dengan Ferdinan rudolf lopulalan, kedua tersangka telah melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan cara merusak sepeda motor korban dengan menggunakan kunci T, pada hari rabu sekitar jam 19.10 Wib di perum gunung sari indah blok BB no. 36 Surabaya.<sup>2</sup>

Prosedur pelaporan korban pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan, yaitu :

1. Identitas diri pelapor : korban haruslah melapor terlebih dahulu pada bagian SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) dengan membawa identitas diri.
2. Korban juga harus membawa kelengkapan surat-surat sepeda motor, yang berupa BPKB dan STNK atau dokumen-dokumen lain yang diduga kuat dapat digunakan sebagai barang bukti kepemilikan.<sup>3</sup>

Proses penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan di Kepolisian Resor Surabaya Selatan, yaitu :

1. Adanya pelaporan korban.
2. Dilakukannya penyitaan barang bukti.
3. Pemeriksaan saksi.

---

<sup>2</sup> Bio Data Kepala Unit I Pidana Umum, Inspektur Dua (IPDA) Bapak. Shabda Purusha Putra, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Surabaya Selatan, Jalan Dukuh Kupang XVI/26-28 Surabaya

<sup>3</sup> *Ibid*

4. Dilakukanya pengiriman barang bukti ke Kepolisian Resor Surabaya Selatan.
5. Dibuatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
6. Berkas lengkap segera dilakukan P.21.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka, rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana tindakan operasional pihak Reserse Kriminal dalam pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan ?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan oleh pihak Reserse Kriminal.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi atas pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan oleh pihak Reserse Kriminal.

## **D. Manfaat Penelitian.**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Untuk mengetahui secara pasti teori ilmu hukum dalam kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

---

<sup>4</sup> *Ibid*

- b. Untuk pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya tentang kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan.
- c. Untuk menambah informasi bagi yang berkepentingan dalam kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Kepolisian adalah diharapkan agar selalu memberikan pengarahan kepada masyarakat agar kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dapat segera ditangani oleh Kepolisian khususnya pihak Reserse Kriminal dan ditangkap pelakunya, agar kasus seperti ini tidak merajalela di tengah-tengah masyarakat.
- b. Bagi Pelaku adalah agar si pelaku jera dan tidak mengulangi tindak kejahatan tersebut.
- c. Bagi Korban adalah agar dapat memberikan pemahaman kepada korban, tentang bentuk pencurian sepeda motor dengan pemberatan, agar dapat lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap sepeda motornya di setiap waktu, di dalam situasi dan kondisi apapun.

## **E. Kajian Pustaka**

### **1. Tugas Dan Fungsi Kepolisian**

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu instansi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dimana peraturan pelaksanaannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan standart oprasional prosedur (SOP) Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam penegakan hukum kepada masyarakat tetap berdasarkan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 2, merumuskan sebagai berikut :

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Kepolisian adalah merupakan suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Pasal 13, merumuskan sebagai berikut :

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1. Untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Pasal 2 Dan Pasal 13 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia



Menegakkan dan menjunjung tinggi hukum adalah merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menangani segala jenis tindak pidana, yaitu : melalui proses penyelidikan dan proses penyidikan.

Proses penyelidikan oleh pihak Kepolisian dilaksanakan setelah adanya pelaporan dari korban, prosedur pelaporan korban di Kepolisian Resor Surabaya Selatan, adalah :

1. Korban harus melapor pada bagian SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian), dengan membawa identitas diri.
2. Korban juga harus membawa berkas-berkas atau kelengkapan lain, yang nantinya akan digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.<sup>6</sup>

## **2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan**

Proses penyelidikan merupakan tindakan pertama yang akan dilakukan oleh Pihak Kepolisian, setelah adanya laporan oleh pihak korban, maka akan segera melakukan proses penyelidikan.

Proses penyelidikan adalah Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>7</sup>

Setelah melakukan proses penyelidikan, kemudian Kepolisian melakukan proses penyidikan, proses penyidikan adalah Serangkaian tindakan

---

<sup>6</sup> *Op.cit*

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, 2001, h. 117.

penyidikan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>8</sup>

### **3. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan.**

Pengertian pencurian adalah sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP, Pencurian sendiri mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatan “mengambil”
2. Yang diambil harus “sesuatu barang”
3. Barang itu harus ”seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk ”memiliki” barang itu dengan ”melawan hak”.<sup>9</sup>

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan adalah pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan pidana lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>10</sup>

Pencurian dengan pemberatan, merupakan pencurian yang disertai unsur-unsur yang dapat memberatkan si pelaku, yaitu :

1. Pencurian pada waktu kebakaran, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
2. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman, atau di pekarangan tertutup yang ada disitu ada rumah kediaman, dilakukan oleh

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 118.

<sup>9</sup> R. Soesilo, *KUHP dan komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1996, h. 249.

<sup>10</sup> *Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, h. 236.

orang yang ada disitu tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak.

3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
4. Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, yaitu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri.<sup>11</sup>

Pengertian Mengambil adalah seseorang dapat dikatakan mengambil, apabila telah melakukan perbuatannya secara paksa (merampas barang milik orang lain), dan tanpa persetujuan si pemilik.

Mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan sebagai mencuri, akan tetapi dia baru mencoba mencuri.<sup>12</sup>

Pengertian Sesuatu Barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dsb.<sup>13</sup>

Menurut Van Bemmelen suatu perbuatan tindak pidana pencurian memiliki sifat yaitu merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga, misalnya sepeda motor, emas, uang dan barang-barang berharga lainnya.

---

<sup>11</sup> C.S.T Kansil, et al, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, h. 145.

<sup>12</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, h. 250.

<sup>13</sup> *Ibid*

Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sebagian kepunyaan orang lain, suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya, dan sebagainya.

Pengertian "Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya". Orang karena keliru mengambil barang orang lain itu bukan pencurian, seorang menemui barang di jalan kemudian diambilnya, bila pada waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu, masuk pencurian. Jika waktu mengambil itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan pada polisi, akan tetapi serenta datang dirumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan pada polisi), dia salah menggelapkan, karena barang yang dimilikinya sudah berada ditangannya.<sup>14</sup>

Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya menurut penulis, adalah seseorang mengambil suatu barang dengan mempunyai sifat untuk dimilikinya secara utuh, tanpa sepengetahuan dari orang lain.

Menurut Noyon-Langemeyer mengenai "memiliki barang" menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendaknya sendiri.

Menurut Van Bemelen melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*

Dia juga berpendapat bahwa berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum.<sup>15</sup>

Sifat melanggar hukum merupakan salah satu unsur dari suatu tindak pidana, di dalam tindak pidana disebutkan bahwa perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana menganut azas legalitas (*principle of legality*), azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu *nullum delictum sine praevina lege poenali* : Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.<sup>16</sup>

#### 4. Pengertian Sepeda Motor.

Sepeda Motor merupakan kendaraan umum yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat, untuk menjalankan aktifitasnya agar tidak terganggu oleh kemacetan kota, sepeda motor merupakan kendaraan yang praktis dan sangat berharga bagi pemiliknya.

Sepeda motor sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat 20, Undang-undang nomor 22 tahun 2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 ayat 2, Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, yaitu :

“Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua, atau tiga tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping”.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, h. 17.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, h. 27.

<sup>17</sup> Pasal 1 ayat 20, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Pasal 1 ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

## **F. Metodologi Penelitian Hukum**

### **1. Jenis Dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu : mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>18</sup>

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Jadi dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan tipe penelitian menggunakan penelitian hukum diskriptif.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder.

Data Sekunder, adalah : data yang bersumber dari perundang-undangan atau terdiri dari bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu : bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dan terdiri dari :

---

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 52.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 50.

1. Norma atau kaidah dasar, yaitu : Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Peraturan Perundang-undangan, yaitu :
  - Undang-undang.
  - Peraturan pemerintah.

Berdasarkan teori diatas, maka Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  3. Undang-undang nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  4. Undang-undang nomor 22 tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
  5. Peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu : memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. (Buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu : bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>20</sup>

### **3. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis skripsi ini, adalah : Data Sekunder, yaitu : studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, Undang-undang, KUHP, Peraturan pemerintah yang berkenaan dengan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan.<sup>21</sup>

### **4. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah metode kualitatif, yaitu : menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian hasilnya akan dimanfaatkan untuk membahas permasalahan yang diajukan di dalam skripsi ini.<sup>22</sup>

### **5. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari skripsi ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 82.

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 127.



BAB I : merupakan pendahuluan yang meliputi uraian tentang latar belakang masalah, latar belakang ini adalah dasar dari pemilihan judul skripsi, setelah di dapatkan permasalahan maka dimasukkan ke dalam rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan. Di dalam bab I ini juga terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian. Agar keempat bagian tersebut dapat digunakan dalam menentukan arah dari skripsi ini. Dengan maksud apa yang dikonsepkan dapat terarah dengan jelas. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan yang berguna untuk meringkas poin yang ada di dalam skripsi.

BAB II : pada bab II merupakan bab pembahasan, dalam bab II ini akan membahas tentang rumusan masalah pada bab I, yaitu : tindakan operasional pihak Reserse Kriminal dalam pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan, yang meliputi : skema proses pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan, proses pelaporan korban pencurian sepeda motor dengan pemberatan, proses penyelidikan korban pencurian sepeda motor dengan pemberatan, proses penyidikan korban pencurian sepeda motor dengan pemberatan, terdiri atas : proses penangkapan, proses penahanan, proses penggeledahan, proses penyitaan, kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan di wilayah Polres Surabaya Selatan, terdiri atas : fakta hukum, pertimbangan hukum, dan analisa hukum.

BAB III : pada bab III merupakan bab pembahasan, dalam bab III ini akan membahas tentang rumusan masalah pada bab I, yaitu : hambatan dan solusi dalam pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan, yang meliputi : Jumlah kasus pencurian sepeda motor dengan pemberatan, hambatan atas pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan, solusi atas pelaporan dan penyidikan pencurian sepeda motor dengan pemberatan.

BAB IV : pada bab IV adalah bab penutup atau akhir, dimana pada bab ini terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu : kesimpulan dari semua pokok bahasan (dari bab I, bab II, bab III) dan saran yang dapat diharapkan dapat berguna bagi pihak yang berkepentingan.